

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang secara bertahap melakukan proses pembangunan negara, baik secara fisik maupun mental untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sehingga membuat Indonesia terus melakukan perkembangan untuk mengatasi segala macam permasalahan yang terjadi salah satunya permasalahan sosial. Masalah sosial merupakan masalah yang tidak ada habisnya sehingga sangat penting untuk diatasi. Tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan karena timbulnya permasalahan sosial yang terjadi akibat dari beberapa factor yaitu diantaranya tingkat pengangguran yang tinggi, minimnya pendidikan dan kemampuan yang di miliki oleh masyarakat<sup>1</sup>.

Munculnya permasalahan umum dinegara berkembang seperti Indonesia saat ini karena perubahan dan kemajuan teknologi semakin pesat, hal ini tidak jarang membuat sebagian masyarakat yang tidak memiliki kesiapan untuk menerima dan menyesuaikan dengan nilai-nilai baru menjadi tertinggal dalam laju perkembangan zaman yang semakin canggih. sehingga hal ini membuat sebagian masyarakat terpinggirkan oleh keadaan, karena dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dengan perilakunya yang

---

<sup>1</sup> Purnama Ellia.(2021). *Analisis Manajemen Strategi Program Penanggulangan Gelandangan dan pengemis (Gepeng) Di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung*. (Bandung : Universitas Al Ghifari 2021).

menyimpang dari norma sosial. Dinas sosial menyebut kelompok masyarakat tersebut dengan sebutan PMKS (penyanggah masalah kesejahteraan sosial).

PMKS merupakan individu atau kelompok yang memiliki kesulitan karena permasalahan sosial sehingga mengakibatkan sulitnya dalam menjalankan fungsi sosial dalam pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani dan wajar<sup>2</sup>.

PMKS sendiri berjumlah 26 kategori Sebagai berikut :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Disabilitas
6. Anak korban tindak kekerasan diperlakukan salah
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

---

<sup>2</sup> Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial diakses <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=glosariumkesos&letter=p> pada 15 Oktober 2022, pukul 23.55 WIB

17. Korban Penyelagunaan NAPZA
18. Korban Perdagangan (*Traffcking*)
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan
26. Komunitas Adat Terpencil<sup>3</sup>

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dibahas pada penelitian ini adalah gelandangan dan pengemis. Menurut Poerwadarminta (dalam muslim, 2013:26) Gelandangan merupakan keadaan orang-orang yang tidak sesuai dengan norma dan kehidupan yang layak dalam masyarakat, dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu, hidupnya mengembara ditempat-tempat umum, dan berpindah pindah tempat. Sedangkan pengertian pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta kepada orang lain dimuka umum dengan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Munculnya gelandangan dan pengemis dapat

Disebabkan kurangnya keterampilan dan bekal pendidikan, terdesak oleh keadaan, kurang siap hidup di kota besar dan lain sebagainya<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> PERMENSOS 08 Tahun 2012. "Pedomaan Pendataan dan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial". 29 Mei 2012. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No.567.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), jika tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang mekin meluas, sehingga akan menimbulkan melemahnya ketahanan sosial masyarakat serta mendorong terjadinya masalah sosial. penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Skripsi ini membahas tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial istilah yang digunakan sebelumnya Gelandangan dan Pengemis. Berikut data menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2021 gelandangan dan pengemis mencapai 1.385 PMKS sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Gelandangan dan Pengemis Provinsi DKI Jakarta**

No	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Gelandangan	1.003	1.096
2.	Pengemis	198	289
Total		1.201	1.385

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta*

Jakarta Selatan menjadi wilayah di DKI Jakarta dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang mencapai 203 orang pada 2021<sup>5</sup>. Yang salah satunya gelandangan dan pengemis. Hal ini dibuktikan pada table 1.2 dibawah ini :

<sup>4</sup> Mevilia taryo A. Dewi, I Ketut Margi, Luh Putu Sendratari, (2020) *Pola Penanganan Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Singaraja, Bulelang, Bali*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha, Vol.2 No.1 HLM 371.

<sup>5</sup>Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta (2021), *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*, [https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/615/1/jumlah-penyandang masalah kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-dan-kabupaten-kota-administrasi-.html](https://jakarta.bps.go.id/indicator/27/615/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-dan-kabupaten-kota-administrasi-.html).

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Gelandangan dan Pengemis Kota Jakarta Selatan**

No	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Gelandangan	130	163
2	Pengemis	28	40
Total		158	203

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Peran pemerintah kota dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis ini sangat penting dan upaya untuk menanggulangnya adalah pemerintah kota DKI Jakarta sendiri khususnya Dinas Sosial. Sesuai dengan di berlakukannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomer 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pemerintah daerah melibatkan peran aktif masyarakat yang potensi sumber kesejahteraan sosial. Hal ini juga berdasarkan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*<sup>6</sup> Penanggulangan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui usaha represif salah satunya dengan Penjaringan atau razia dan upaya rehabilitatif dapat dirujuk pada panti sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomer 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.<sup>7</sup>

Fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Jakarta Selatan, membuat peneliti tertarik untuk lebih mendalami mengenai proses dalam penjaringan,

---

diakses pada 10 Oktober 2022, Pukul 17: 00 WIB

<sup>6</sup>Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1980. *“Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis”*. 10 September 1980. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 No.51.

pembinaan dan pengentasan yang dilakukan oleh pemerintah guna mengentaskan gelandangan dan pengemis ini. Adapun alasan yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penjaringan pembinaan dan pengentasan PMKS di Jakarta Selatan untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai proses penanggulangan yang dilakukan pemerintah Jakarta Selatan. Alasan tersebut membuat peneliti tertarik untuk menjadikan penjaringan pembinaan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai bahan untuk diteliti.

Pemerintah kota Jakarta Selatan melalui Suku Dinas sosial kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki peran penting dalam menangani berbagai permasalahan sosial di kota Administrasi Jakarta Selatan dengan adanya penyandang masalah kesejahteraan sosial dimana istilah lamanya disebut gelandangan dan pengemis. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti mengangkat judul penelitian mengenai “Penjaringan Pembinaan dan Pengentasan PMKS di Jakarta Selatan 2021-2022”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana proses penjaringan pembinaan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta selatan 2021-2022 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara langsung proses penjaringan pembinaan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS) di Jakarta Selatan 2021- 2022 dalam proses penjaringan pembinaan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta Selatan 2021- 2022.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan atau manfaat dalam kajian sosiologi. Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Praktis**

- 1). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi masyarakat kota Jakarta selatan untuk lebih mengetahui penjaringan pembinaan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta selatan 2021-2022.
- 2). Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian yang praktis bagi pemerintah untuk memaksimalkan penjaringan pembinaan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta selatan 2021-2022.

##### **b. Manfaat Teoritis**

- 1). Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kesejahteraan sosial
- 2). Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai penjaringan, pembinaan dan pengentasan

penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta selatan 2021-2022.

3). Memberikan informasi yang dapat diaplikasikan pada kehidupan agar dapat membantu pemerintah meminimalisir penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta selatan 2021-2022.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang disusun dengan sistematika yang ada sebagai berikut :

Pada bagian awal berisi halaman sampul, lembar persetujuan skripsi, surat pernyataan orisinalitas, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

Sedangkan pada bagian inti dari skripsi ini berisi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan penulis berusaha menjelaskan tentang latar belakang masalah yang ingin diteliti mulai dari penjelasan yang umum sampai pada penjelasan yang khusus agar supaya gambaran dari masalah yang sedang diteliti dapat tergambar dengan baik, peneliti juga memberikan rumusan masalah yang ingin di ketahui, tujuan dari adanya penelitian ini mulai dari tujuan yang umum sampai pada tujuan yang khusus, kegunaan dari penelitian yang sedang diteliti, serta juga menjelaskan sistematika penulisan skripsi ini.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bagian kajian pustaka, peneliti berusaha untuk dapat memaparkan secara rinci penelitian terdahulu yang merupakan acuan untuk dapat melakukan penelitian saat ini, serta juga untuk dapat melihat adanya kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan juga penelitian yang sedang peneliti lakukan. Selanjutnya pada bagian tinjauan pustaka juga terdapat kajian kepustakaan yang merupakan bagian untuk menjelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dalam bab dua adalah bagian untuk menjelaskan teori kebijakan sosial yang merupakan bagian untuk memaparkan teori yang di gunakan dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti beserta dengan kerangka teori yang di buat dengan pemikiran peneliti sendiri. Selanjutnya adalah kerangka berpikir yang merupakan bagian di mana peneliti membuat sebuah table atau alur berpikir untuk dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis masalah yang sedang di teliti.

### BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian, peneliti berusaha untuk memberikan penjelasan tentang pendekatan penelitian yang digunakan, penentuan informan yang digunakan, teknik pengumpulan data yang digunakan, teknik pengolahan dan analisis yang digunakan, serta memberikan penjelasan tentang lokasi dan jadwal penelitian.

### BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan, peneliti berusaha untuk dapat memberikan gambaran umum tentang kondisi wilayah penelitian, serta uraian dari rumusan

masalah yang telah dibuat sebelumnya. Pada bagian ini peneliti akan memaparkan analisis yang di buat dengan mengacu kepada teori yang digunakan serta data dari hasil wawancara dan juga data dari jurnal maupun buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang di teliti.

## BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup, peneliti berusaha untuk memaparkan kesimpulan dari pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah yang telah dibuat di bab sebelumnya dan yang telah dipaparkan di bab empat, serta juga peneliti berusaha untuk dapat memberikan saran.

